

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada SKPD Kabupaten Buol)

Sahroni S. Langenre

sahroni.bpkp14@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of the study is to determine variable that influence the quality of financial statements of local government. The quality of financial statement referring to four normative preconditions such as: relevance, reliable, comparable, and understandable. The independent variable include human resource capacity, utilization of local management information system technology, and implementation of government accounting standars. Data collection is done by distributing questionnaire to 53 governmental intitutions in Buol regency and also interviewing head of DPPKAD. Data analyzed with SPSS version 17,0 and microsoft excel. Hytesis tested with multiple linier regresion analysis. The results show that, first, human resource capacityti, utilization of local management information system technology, implementation of government standars simultaneously have positive and signivicant influence on the quality of the local government financial statements. Secon, human resource capacity has no positive and significant influence on the local management information system technology, implementation of government accounting standars partially have positive and significant influence on the quality of the local government financial statements.

Keywords: *Human resource capacity, utilization of local management information system technology, implementation of government accounting standars, and the quality of the local government financial statement*

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo, 2006:4)

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada

pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. (Daniel, 2013:96)

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapnya pemerintah daerah mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi sistem informasi yang lebih tinggi. (Junaini, 2012:4)

Pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan

tugasnya, memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Buol wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem teknologi informasi yang ada (Nurlaila, 2014:37).

Banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan, dan masih banyak pula penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. (Jannaini, 2012:4)

Menurut informasi dari berbagai tingkatan pegawai di Dinas dan Kantor Pemerintahan Kabupaten Buol, laporan keuangan Kabupaten Buol belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Sesuai yang di lansir oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2010 bahwa hal-hal yang menjadi temuan BPK RI di Kabupaten Buol diantaranya mengenai inventarisasi aset, penerimaan dan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini menggambarkan ada yang salah atau kurang efektif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini WTP pada umumnya laporan keuangannya dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan. (Ningtyas, 2015:2)

Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Hingga saat ini pemerintah daerah kabupaten buol belum meraih opini WTP dari BPK. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Buol membuat program/kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparaturannya. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan sistem akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Warsito, 2008:100).

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol” adalah jenis penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*), penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya, atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya. (Sugiono, 2014:38).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Buol yang berjumlah 53 satuan kerja yang terdiri

dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. Responden dalam penelitian ini adalah PPK-SKPD Pemerintah Daerah kabupaten Buol. Penyampelan atas responden dilakukan dengan menggunakan *sampling* jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2011:68).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden penelitian pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buol.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: variabel bebas yang terdiri dari: Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X_2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_3) serta variabel terikat yaitu Kualitas Laporan keuangan (Y). Defenisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)
Menilai kapasitas dan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut.
2. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X_2)
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_3)
Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan serta pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk.

4. Kualitas laporan keuangan (Y)
Merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sesuai standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknik Pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer melalui observasi, kuesioner dan wawancara.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Sistem Akuntansi Instansi (X₁) Pengawasan (X₂) dan kompetensi pengelola anggaran (X₃) terhadap variabel terikatnya yaitu Kualitas laporan keuangan (Y). Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Kualitas laporan keuangan (Variabel Dependen)

a = Intersep (Konstanta)

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

X₁ = Kapasitas SDM (Variabel Independen)

X₂ = Pemanfaatan SIMDA (Variabel Independen)

X₃ = Penerapan SAP (Variabel Independen)

e = Kesalahan pengganggu (*error term*)

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi *R Square* (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 12 satuan kerja dengan 53 responden dengan dugaan pengaruh variabel independen (Sistem Akuntansi Instansi, Pengawasan, Kompetensi) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.14. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (X₁), Pengawasan (X₂), Kompetensi (X₃) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel Dependen (Y) = Kualitas Laporan Keuangan			
Variabel Independen (X)	Koefisien Regresi	t	Sig.
Constanta	0,580	1.425	0.161
Kapasitas SDM (X ₁) _i	0.138	0.818	0.417
SIMDA (X ₂)	0.300	3.040	0.004
SAP (X ₃)	0.443	6.072	0.000
R	= 0.776		
R Square (R ²)	= 0.602		
Adjusted R- Square	= 0.557		
F _{hitung}	= 24.678		
Sig F	= 0.000		

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.580 + 0.138X_1 + 0.300X_2 + 0.443X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0.580. Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (Y) mempunyai nilai sebesar 0.580 tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas (Kapasitas SDM,

Pemanfaatan SIMDA, dan Penerapan SAP).

2. Variabel kapasitas SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.138. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya kapasitas SDM yang memadai pada satuan kerja akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah kabupaten Buol.
3. Variabel pemanfaatan SIMDA menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.300. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan aplikasi SIMDA, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol.
4. Variabel penerapan SAP menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.443. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol.

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya yakni kapasitas sumber daya manusia (X₁), pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah (X₂) dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (X₃) dengan variabel tidak bebasnya Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Berdasarkan uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R Square R² = 0,602. Hal ini berarti bahwa sebesar 60,2% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh ketiga

variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.14 dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 24.678$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $P < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Probabilitas = 0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa: "Secara simultan Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol" berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga dan Keempat

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Variabel kapasitas sumber daya manusia menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,138 dan tingkat signifikansi sebesar 0,417 sedangkan untuk nilai $P > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kapasitas SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "secara parsial kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan Badan Pusat Statistik di Sulawesi Tengah" *tidak terbukti*.

2. Pemanfaatan Teknologi SIMDA (X₂)

Variabel pemanfaatan teknologi SIMDA menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar

0,300 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004 sedangkan untuk nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa "secara parsial pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol" ternyata *terbukti*.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_3)

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,443 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan untuk nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa "Secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol" ternyata *terbukti*.

Pembahasan Hipotesis Penelitian Bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol

Belakangan ini fokus pemerintah daerah kabupaten Buol tidak hanya pada pengelolaan keuangan, akan tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi yang ada serta penerapan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah daerah kepada BPK selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Ketidaksihinggaan penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol. Hingga saat ini pemerintah daerah kabupaten Buol belum meraih opini WTP dari BPK. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan sistem akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang lebih kompleks dengan batasan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentu saja membutuhkan individu-individu yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai. Namun pada kenyataannya, jumlah sumber daya manusia yang dapat memenuhi tuntutan tersebut masih belum mencukupi. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten Buol, agar penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (Satmoko, 2010:6-9)

Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol

Hasil pengujian untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini secara simultan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai rata-rata *mean* distribusi tanggapan responden yang dikategorikan baik (tabel 4.8-4.11), berdasarkan pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dengan

adanya kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan baik maka akan memberikan implikasi yang baik pula terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh signifikan ketiga variabel independen tersebut juga dapat kita lihat pada hasil tanggapan responden terhadap kuesioner penelitian. Dimana dari hasil tanggapan responden, sebagian besar menjawab bahwa sistem akuntansi instansi, pengawasan dan kompetensi yang diterapkan di satuan kerja Badan Pusat Statistik telah sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari Standar Akuntansi Pemerintahan saja, akan tetapi kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (Wahyudi, 2010).

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala DPPKAD Kabupaten Buol Bapak Drs. Arianto Rioeh.,M.Si, Beliau menegaskan bahwa:

“Sistem teknologi yang ada sudah sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan, hanya saja ketika sistem tersebut disandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, terkendala dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Apriansyah Dhany (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia secara parsial tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaksignifikan ini disebabkan karena ketersediaan kapasitas sumber daya manusia pada subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang belum mendukung dari segi kualitas dan kuantitas. Dimana sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi atau tata usaha keuangan SKPD tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi dan tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Secara umum, masih sangat sedikit jumlah pegawai yang berpendidikan akuntansi, sementara perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada diberdayakan sebisa mungkin.

Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan sistem akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Warisno, 2008:15).

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala DPPKAD Kabupaten Buol, Bapak Drs. Arianto Rioeh.,M.Si yang menegaskan bahwa:

“Ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sangatlah sedikit, menurut beliau di DPPKAD sendiri hingga saat ini hanya memiliki beberapa staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dan baru tahun ini ada dua bidang yang diisi oleh tenaga akuntansi. Hal ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buol, karena sebaik-baiknya suatu sistem manusialah yang menjalankannya. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Buol membuat sebuah kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya dibidang akuntansi, dengan memberikan pelatihan maupun pendidikan tambahan”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), dan Zuliarti (2012) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena latar pendidikan, serta deskripsi jabatan yang masih bersifat umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Pengaruh pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Rata-rata tanggapan responden berdasarkan nilai *mean* seperti pada tabel 4.9, pada kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan aplikasi

SIMDA keuangan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola anggaran pendapatan belanja daerah dimana volume transaksinya dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu. (Sutanta, 2003:11)

Output yang dihasilkan SIMDA Keuangan yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk bagian penganggaran. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bagian penatausahaan. Dan jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan. (Mitami, 2013:13)

Pernyataan tersebut diatas diperkuat lagi melalui Hasil wawancara dengan kepala DPPKAD Kabupaten Buol, Bapak Drs. Arianto Rioeh.,M.Si mengatakan bahwa:

“Adanya sistem teknologi informasi ini sangat membantu pemerintah daerah kabupaten dalam membuat laporan keuangan, meskipun sistem tersebut baru bisa dapat dioptimalisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Buol pada tahun 2012. Aplikasi SIMDA keuangan membantu mempermudah pengelola keuangan dalam melakukan semua proses yang terjadi dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan mulai dari tahap penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Apriansyah Dhany (2010) dimana

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya.

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Rata-rata tanggapan responden baik seperti pada tabel 4.10, dalam menjawab pernyataan yang ada. Temuan ini juga mendukung berbagai literatur yang menjelaskan tentang tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Mahmudi, 2011:271)

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan Hasil wawancara dengan kepala DPPKAD Bapak Drs. Arianto Rioeh.,M.Si menjelaskan bahwa:

“Sistem akuntansi yang ada cukup sangat membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Meskipun masih terkendala dengan ketersediaan sumber daya aparatur khususnya dibidang akuntansi. Beliau menegaskan “siapa tidak siapa pemerintah daerah harus tetap melaksanakannya”. Sehingga sampai saat ini pihak pemerintah daerah kabupaten Buol sering melakukan konsultasi dengan pihak BPK dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buol”.

Hasil pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlaila (2014) pada pemerintah daerah kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya dibidang akuntansi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buol masih belum memadai.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah khususnya Aplikasi SIMDA keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buol sudah dapat menunjang peningkatan kinerja penata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol yang dibuktikan dengan opini BPK. Meskipun hingga saat ini belum sampai pada predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buol sudah mulai membaik, perubahan basis akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah mengacu pada basis akrual, meskipun belum secara penuh, namun penatausahaan keuangan sudah pada masa transisi yaitu kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA). Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan opini dari TMP menjadi WDP oleh BPK, dimana dalam hal ini entitas telah melakukan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya.
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dapat dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang belum

memenuhi kriteria baik, karena terbatasnya sumber daya aparatur dalam memahami logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan penggunaan sistem dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berdampak pada kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang mungkin dapat diberikan pada pemerintah daerah Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibidang akuntansi, mengingat minimnya tenaga akuntansi yang bekerja sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah. Disamping itu juga perlu adanya deskripsi jabatan yang jelas, karena ini menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dengan baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Secara akademis, penelitian ini hanya mencakup Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain seperti; Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Pengendalian Intern, Sarana dan Prasarana pendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Ridwan, SE.,M.Si.,Ak dan Dr. M. Iqbal A., SE.,M.Si.,Ak. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan

mendorong lainnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani Wiwik. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol.5. No.1.
- Apriansyah Dhany. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Bengkulu).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Informasi Umum. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>.
- Daniel Kartika Adhi,dan Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah kabupaten Tual). *Jurnal STIE*. Semarang.
- Ghozali, Iman. 2006. *Analisis Multivariate Dengan Proses SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriasari Desi dan Ertambang. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang) *Skripsi Jurusan Ekonomi*.
- Kawedar Warsito, Abdul Rohman, Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam*

- Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 1. Mei 2006: halaman 1-17.
- Mitami M. Dian. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Pangkep. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Ningtyas Eka Pravytasari. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIESIA. Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 1.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang) Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik*. Diakses tanggal 9 April 2012.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kabupaten Kudus: *Skripsi Jurusan Ekonomi*. Universitas Muria Kudus.